

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Pemprov Segera Audit BUMD

Entitas / Cakupan : Pemprov

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.3

Edisi : Selasa, 9 Oktober 2018

Pemprov Segera Audit BUMD

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengaudit seluruh badan usaha milik daerah (BUMD) hingga Desember tahun ini. Dari 11 BUMD yang ada saat ini hanya beberapa yang bisa memberikan kontribusi bagi daerah.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan akan membereskan persoalan BUMD yang belum tuntas di masa kepemimpinan sebelumnya. "Nanti akan ada BUMD tiga teratas dan tiga terbawah. Nanti akan ada kategorinya," ujar Ridwan, Senin (8/10/2018).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pihaknya memang tengah melakukan proses pemeringkatan BUMD. "Hal itu sedang kami lakukan. Setelah itu akan keluar kajian dan kemudian

akan mencari solusi yang terbaik. *Kan* tidak selamanya harus penyer-taan modal. Apakah nanti solusinya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kami juga meninjau ulang rencana bisnis dan membangun mitra kerja agar BUMD non-keuangan bisa menguntungkan bagi daerah," kata Iwa.

Ia mengakui, saat ini pihaknya memprioritaskan BUMD keuangan untuk mendapat suntikan modal dari pemerintah. "BUMD pertama yang kami beri tambahan modal dari anggaran perubahan 2018 ini hanya BJB sebesar Rp 88,2 miliar. Ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, supaya penyer-taan modal kami sebagai saham pengendali tidak turun kepemilikannya. Kedua, karena BJB kontributor terbesar PAD sehingga dengan penyer-taan modal ini diharapkan terus ada peningkatan," tutur dia.

Penyer-taan modal tersebut, kata Iwa, akan dilakukan secara bertahap dan ditindaklanjuti. "Jadi prioritas

tahun ini ke BJB dan yang lainnya akan kami dorong ke yang sifatnya (BUMD yang bergerak) keuangan karena menguntungkan seperti BPR," kata dia.

Iwa menambahkan, untuk BUMD nonkeuangan akan dikaji lebih dalam untuk mengetahui aspek yang mesti diperbaiki seperti sumber daya manusia, komisaris, rencana bisnis, direksi, dan sinerginya. Dengan demikian, pihaknya akan punya postur BUMD yang memang memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk dividen.

Belum buka data

Sementara itu, Pemprov Jabar masih belum membuka data terkait dengan kondisi terkini dari 11 BUMD Jabar yang selama ini menjalankan bisnisnya. Saat ini, Pemprov Jabar tengah mengagendakan untuk melakukan audit terhadap 11 BUMD.

Untuk mengetahui kondisi terkini BUMD di Jabar, "PR" telah menghu-

bungi Kepala Biro Sarana Perekonomian, Investasi, dan Badan Usaha Milik Daerah Noneng Komara Nengsih melalui pesan singkat untuk bisa menelepon. Namun, hal itu belum mendapat respons dari yang bersangkutan.

Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Eddy Iskandar Muda Nasution mengatakan, belum memiliki data terkait dengan kondisi BUMD terkini. Yang pasti, menurut dia, dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan audit terhadap seluruh BUMD yang dimiliki oleh Jabar.

Pihaknya pun tidak memungkiri, ada beberapa BUMD yang memang harus segera dibenahi. Di antaranya BUMD yang merugi dan banyak memiliki anak perusahaan.

"Kami memang hati-hati dalam soal ini (termasuk data) karena hal ini menyangkut kondisi manajemen perusahaan," ujar dia. **(Novianti Nurulliah)*****